

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo berdiri pada tanggal 19 Maret 2008 di Provinsi Gorontalo untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kemitraan dan koordinasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak selama kurun waktu 2021 akan senantiasa dikembangkan demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai institusi pengawas obat dan makanan di Propinsi Gorontalo.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017, Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Gorontalo merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI).

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok:

“Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari 3 Seksi dan 1 Sub Bagian Tata Usaha yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Seksi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
3. Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, serta intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM di Gorontalo



1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Tugas utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis karena produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat / konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1.4.1. Lingkungan Internal (Kapasitas Balai POM di Gorontalo)

Balai POM di Gorontalo terletak di Jl. Tengah, Toto Selatan, Bone Bolango yang berbatasan dengan wilayah kota Gorontalo. Gedung balai POM di Gorontalo terdiri dari dua lantai yang menempati tanah seluas lebih dari 5 hektar, lantai dasar diisi oleh seksi pemeriksaan dan penindakan, seksi informasi komunikasi, seksi pengujian teranokoko, ULPK, gudang reagen & suku cadang sementara dilantai 2 diisi sub bag Tata Usaha, Kepala Balai, aula, seksi pengujian pangan bahan berbahaya & mikrobiologi. Saat ini laboratorium Balai POM di Gorontalo telah menjadi rujukan hasil pengujian obat dan makanan di Provinsi Gorontalo.

a. Luas Tanah

1. Kantor Lama (POS POM)	:	333 m ²
2. Kantor Baru	:	5.630,12 m ²

b. Luas Bangunan

1. Kantor Lama	:	100 m ²
2. Kantor Baru	:	2.277,60 m ²

c. Status Kepemilikan Tanah

1. Kantor Lama	:	Hak Milik Badan POM RI
2. Kantor Baru	:	Hak Milik Badan POM RI

d. Rumah Dinas

:	:	1 Unit (Sewa)
---	---	---------------

e. Penerangan

PLN	:	130 KVA
-----	---	---------

f. Sarana Komunikasi

1. No. Telepon	:	(0435)822052, 08114355155
2. Nomor Faximili	:	(0435) 822052
3. Alamat e-mail	:	ulpk_gorontalo@yahoo.co.id bpom_gorontalo@pom.go.id
4. Jaringan Internet	:	Icon+ dan Indihome

g. Sumber air

1. PDAM
2. Sumur Bor

h. Kendaraan (Laik Pakai)

1. Kendaraan Roda Empat

- a. Suzuki APV Arena GL :Tahun Perolehan 2008
- b. Toyota Rush :Tahun Perolehan 2009
- c. Kijang Innova G :Tahun Perolehan 2010
- d. Kijang Innova V :Tahun Perolehan 2013
- e. Isuzu :Tahun Perolehan 2013 (Lab Keliling)
- f. Suzuki APV Pick Up :Tahun Perolehan 2016
- g. Daihatsu :Tahun Perolehan 2017 (Lab Keliling)
- h. Kijang Innova Q : Tahun Perolehan 2019

2. Kendaraan Roda Dua

- a. Kawasaki :Tahun Perolehan 2007
- b. Yamaha Jupiter Z :Tahun Perolehan 2009
- c. Yamaha Xeon :Tahun Perolehan 2014

i. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo per 31 Desember 2021 adalah 46 orang, 2 orang sementara mengikuti tugas belajar di tambah 24 Orang Pegawai Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai PNS

- Tata Usaha : 11 Pegawai (1 Pegawai Tubel)
- Pengujian : 21 Pegawai (1 Pegawai Tubel)
- Infokom : 5 Pegawai
- Pemdak : 9 Pegawai

b. Pegawai NON PNS

- Satpam : 5 Orang
- Pramubakti : 7 Orang
- Pramubakti Laboratorium : 5 Orang
- Cleaning Service : 3 Orang

- Sopir : 4 Orang

c. Jenis Pendidikan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan jumlah pegawai 46 Pegawai (2 pegawai tugas belajar), berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Strata Dua (S.2) : 2 Orang
2. Apoteker : 15 Orang
3. Strata Satu (S.1) : 16 Orang
4. Diploma Tiga (D.3) : 13 Orang

j. Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 14.054.952.000,-(empat belas miliar lima puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Tanggal 13 oktober DIPA Pemotongan APBNP keluar sehingga Pagu Balai POM di Gorontalo berubah Menjadi Rp.13.166.952.00,- (Tiga belas miliar seratus enam puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan 4 Tahun 2021 Balai POM di Gorontalo dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp 12.506.311.200,- (94,98%).

1.4.2. Lingkungan Eksternal (Data Umum Provinsi Gorontalo)

a. Luas wilayah

Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km². Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah Provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen, Provinsi Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, secara geografis Provinsi Gorontalo berada di bagian utara pulau Sulawesi, yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara berhadapan langsung dengan Selat Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.

b. Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo

- ❖ Kota : 1 (Satu)
- ❖ Kabupaten : 5 (Lima)
- ❖ Kecamatan : 77 (Tujuh puluh tujuh)
- ❖ Desa : 663 (Enam Ratus Enam Puluh Tiga)

Wilayah kerja Balai POM di Gorontalo :

1. Kabupaten Boalemo dengan luas wilayah 1.736,61 km²
2. Kabupaten Gorontalo dengan luas wilayah 2.143,48 km²
3. Kabupaten Pohuwato dengan luas wilayah 4.455,60 km²
4. Kabupaten Bone Bolango dengan luas wilayah 1.891,49 km²
5. Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas wilayah 2.141,86 km²
6. Kota Gorontalo dengan luas wilayah 65,96 km²

c. Pola Transportasi di Wilayah Kerja Balai POM di Gorontalo

Pola Transportasi yang digunakan ke semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo adalah melalui transportasi darat.

d. Lama Waktu Perjalanan Ke Wilayah Kerja

Tergantung wilayah kerja yang akan dikunjungi, waktu tempuh tercepat dari ibu kota Provinsi adalah sekitar ± 1 jam dengan kendaraan umum, sedangkan waktu tempuh terjauh selama ± 6 jam yaitu ke Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

e. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang diperlukan dalam satu wilayah kerja dari Kota Gorontalo Ke Kabupaten Bone Bolango ± 2 Jam, Kabupatem Gorontalo ± 1,5 Jam, Kabupaten Gorontalo Utara ± 3 Jam, Kabupaten Boalemo ± 4 Jam dan Kabupaten Pohuwatu ± 6 Jam

f. Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 482 sarana dengan rincian sebagai berikut:

a. Sarana Produksi Produk OMKA	: 24
b. Sarana Distribusi Produk OMKA dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	: <u>458</u> +
TOTAL	: 482

1.5. ISU STRATEGIS

1. COVID 19

Balai POM di Gorontalo melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode *work from home* (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui *desktop inspection*, pelayanan publik dilakukan melalui *online*, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara *on-call* menggunakan sistem piket. Selain itu Balai POM di Gorontalo mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari); dan berkoordinasi dengan Pemda (Gubernur, Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi Gorontalo) dalam pengembangan laboratorium pengujian Covid-19.

Disisi lain Balai POM Gorontalo menjadi Laboratorium Penguji COVID-19 di Provinsi Gorontalo dan untuk selanjutnya Sampel Spesimen akan dilakukan pengujian di Laboratorium Mikrobiologi BPOM di Gorontalo sehingga pemerintah Daerah tidak Lagi mengirimkan sample/spesimen di Labkesda di Makassar.

2. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Gorontalo masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

3. Peredaran Produk Pangan Mengandung Bahan Berbahaya

Produk pangan mengandung bahan berbahaya banyak dijumpai terutama di pasar-pasar tradisional karena adanya permintaan dan daya beli masyarakat yang masih rendah, sehingga pelaku usaha cenderung mengikuti demand untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Program Pasar Aman Bebas Bahan Berbahaya adalah salah satu upaya Balai POM di Gorontalo agar produk pangan yang dijual di pasar-pasar tradisional bebas dari bahan berbahaya. Program ini memberdayakan komunitas pasar yang terdiri dari (i) petugas dinas pasar, diberikan bimbingan teknis untuk melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar(ii) peran serta pedagang pasar agar menjual produk pangan yang aman melalui Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) dalam bentuk penyuluhan serta (iii) pemberdayaan masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, mampu memilih dan memilah produk obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/ berisiko terhadap kesehatan.

4. Perkembangan Teknologi Informasi

Teknologi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Adanya revolusi industri 4.0 sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun hal lainnya. Salah satu dampak dari revolusi industri 4.0 ini adalah pemanfaatan teknologi tidak sebagaimana mestinya. Hal ini

menjadi suatu tantangan tersendiri dalam sistem pengawasan BPOM di Gorontalo dimana tren penjualan produk obat dan makanan ilegal juga semakin bervariasi dan meningkat. Penggunaan teknologi dalam penyebaran produk obat dan makanan ilegal dapat meningkatkan resiko kesehatan bagi masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang terutama bagi masyarakat yang belum memahami tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan akibat penggunaan produk obat dan makanan ilegal tersebut. BPOM di Gorontalo melihat revolusi industri 4.0 ini juga sebagai peluang untuk pemanfaatan teknologi dengan layanan informasi dan pengaduan melalui media sosial yang ada, seperti Subsite, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan media lainnya. Selain itu BPOM di Gorontalo juga secara rutin membuat konten terkait Obat dan Makanan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan menangkalkan hoax yang beredar.

5. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan tersebut.

Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu.

Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan dan pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau BPOM untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan pengawasan yang lebih komprehensif.

Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan semakin mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan masyarakat tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat semakin meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh BPOM dalam penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu.

Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat adalah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu obat yang beredar seperti Kemenkes, Dinkes, BKKBN termasuk industri farmasi dalam hal tingkat kematangannya dalam penerapan CPOB. Terkait meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta pengobatan secara tradisional di masyarakat diperlukan peningkatan penelitian ilmiah lebih lanjut.

Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali. Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut mengubah pola dan gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, BPOM selama ini melakukan kontrol dalam bentuk penilaian sebelum produk beredar di pasar dan pengawasan secara ketat terhadap

produk yang sudah beredar luas di masyarakat. Selain itu, BPOM juga dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Balai POM di Gorontalo merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasaan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai POM di Gorontalo, yaitu:

No	Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar	No	Upaya terkait kemandirian Obat dan Makanan
1	Pengawasan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, SKPD, pelaku usaha dan masyarakat secara terpadu dan bertanggung jawab;	1	Pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) agar dapat melakukan produksi sesuai CPMB dan dapat melakukan usaha dan menjalankan usaha secara efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing.
2	Pelaksanaan pengawasan yang baik didukung dengan sumber daya yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, sistem manajemen mutu, referensi ilmiah, kerja sama antar Balai, laboratorium pengujian mutu yang andal, independen dan transparan;		
3	Pengambilan dan pengujian sampel, surveilan, serta pemantauan label atau penandaan iklan dan promosi;		
4	Penegakan hukum yang konsisten dengan efek jera yang tinggi untuk setiap pelanggaran, termasuk pemberantasan produk palsu dan ilegal;		
5	Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif sebagai upaya yang terpadu antara upaya refresif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;		

6	Perlindungan masyarakat terhadap cemaran sediaan farmasi dari bahan-bahan dilarang atau penggunaan bahan tambahan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan;
---	---

6. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

SJSN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (*means*), sekaligus tujuan (*ends*) dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi SJSN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena perusahaan/industri obat akan berusaha menjadi *supplier* obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan *demand* terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsungnya diasumsikan adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dampak lain adalah banyak industri farmasi yang akan melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, maka akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Dalam hal ini peran BPOM akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar.

Dengan penerapan SJSN, Balai POM di Gorontalo juga harus lebih intensif dalam melaksanakan pengawasan *post-market* terhadap mutu obat beredar termasuk farmakovigilans utamanya Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

7. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait: ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat dan massif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) *Free Trade Area*, *ASEAN-China Free Trade Area*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)*, *ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)* dan *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*. Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri farmasi, obat

tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah obat, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Di sisi lain, secara nasional jumlah apotek yang ada juga masih kurang, dimana belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan apotek.

Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi. Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih banyaknya ditemukan obat-obat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data WHO (*World Health Organization*), praktik pemalsuan produk obat di dunia rata-rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi BPOM sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terkait dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan data Balai POM di Gorontalo, jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditemukan di lapangan masih banyak dengan didapati beberapa kasus di bidang penyidikan obat dan makanan, masih terdapat hasil uji laboratorium pada tahun 2021 untuk produk tidak memenuhi syarat (TMS).

8. Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia.

Semakin besarnya kontribusi industri pengolahan, dengan subsektor makanan, minuman dan tembakau serta sub-sektor pupuk, kimia dan barang dari karet terhadap *output* nasional, maka akan semakin besar juga tugas dari Balai POM di Gorontalo untuk mengawasi dan menjamin keamanan proses produksi produk makanan dari hulu hingga hilir. Selain produk makanan yang termasuk didalamnya, terdapat industri obat-obatan, yakni obat kimia, maupun suplemen yang berbahan baku dari herbal. Ekonom Faisal Basri dalam Kompasiana, Nopember 2010, menyatakan bahwa industri makanan dan minuman berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil ekspor-impor produk makanan dan minuman serta peringkat pertumbuhan industri. Namun hasil peningkatan ini masih perlu didukung dengan peran teknologi (inovasi produk, kemasan dan lainnya), infrastruktur (logistik kebutuhan industri), institusi (peraturan yang terkait industri makanan dan minuman), *health and primary education* (sumber daya manusia Indonesia). Jadi peran dan fungsi dari Balai POM di Gorontalo akan semakin berat dan sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah Obat dan Makanan mengandung bahan berbahaya bagi tubuh.

9. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan

kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Gorontalo adalah melakukan pengawasan *post-market*.

Berdasarkan data sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang ada di provinsi Gorontalo tahun 2019 (41 sarana produksi Obat dan Makanan, 803 sarana distribusi Obat dan makanan) ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif begitu besar dibanding tenaga pengawas Balai POM yang ada, Balai POM di Gorontalo harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

10. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, diantaranya Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km². Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53 persen.

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2018 adalah 1.168.190 jiwa, di mana Laki-laki mencakup angka tertinggi yang berjumlah 585.210 jiwa sementara Perempuan berjumlah 582.980 (Sumber BPS : Gorontalo Dalam Angka 2019).

Rata rata laju pertumbuhan penduduk pertahun menurut Kabupaten/ Kota adalah Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Boalemo sebesar 158.333 atau Laju Pertumbuhannya 2,81 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo

sebesar 374.923 atau Laju Pertumbuhannya 0,55 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Pohuwato sebesar 153.991 atau Laju Pertumbuhannya 2,40 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar 157.186 atau Laju Pertumbuhannya 1,25 %, Jumlah Penduduk untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 112.975 atau Laju Pertumbuhannya 1,03 %, dan Jumlah Penduduk untuk Kota Gorontalo sebesar 210.782 atau Laju Pertumbuhannya 2,10 %.

11. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) sehingga perlu adanya *one line command* (satu komando), apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan di antaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai POM di Gorontalo berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik (*sound governance*). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan yang dilimpahkan ke daerah.

12. Perkembangan Teknologi

Pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik, namun penyediaan bahan baku obat yang diperoleh dari impor mencapai 96% dari kebutuhan. Padahal, Indonesia memiliki 9.600 jenis tanaman berpotensi mempunyai efek pengobatan, baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai bahan baku. Dengan kemajuan teknologi dan besarnya kebutuhan sehingga produk-produk farmasi semakin banyak yang beredar yang menjadi objek pengawasan.

Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi. Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga distribusi Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk itu, dampak pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi, dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat termasuk seluruh wilayah kabupaten, Kota Provinsi Gorontalo sehingga antipasi pengawasan obat dan makanan juga harus sama cepatnya.

Seiring dengan Kemajuan teknologi produksi di bidang Obat dan Makanan meliputi perkembangan vaksin baru dan produk biologi lain, pangan hasil rekayasa genetika, pangan iradiasi. Ini adalah sebagian dari kemajuan teknologi produksi yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kondisi ini menuntut Balai POM di Gorontalo meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sebagai unit pengawas, utamanya pengetahuan teknologi laboratorium pengujian Balai POM di Gorontalo.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya.

Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat

menjangkau areal yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu,antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Gorontalo untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan Bagi Balai POM di Gorontalo terkait trend pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

13. Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan Pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi.

Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam dan tepung terigu, mengingat masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurangnya yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai POM di Gorontalo.

Untuk mengawal program ini, Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (tepung terigu dan garam) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (*compliance*) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana peredaran dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan, pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan,

pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

14. Jejaring Kerja

Balai POM di Gorontalo menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Gorontalo membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah (SKPD). Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas-tugas Balai POM di Gorontalo maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring yang kerja sudah dimiliki Balai POM di Gorontalo yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI BADAN POM TAHUN 2021-2024

Visi Balai POM di Gorontalo 2021-2024 mengacu pada visi Badan POM, yaitu

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektifitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaan untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;*
2. *Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;*
3. *Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;*
4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.*

2.2. INDIKATOR KINERJA BALAI POM DI GORONTALO TAHUN 2021

Berdasarkan Penetapan kinerja Balai POM di Gorontalo Tahun 2021 terdapat 11 sasaran kegiatan :

Tabel. 2.1 Indikator Kinerja Balai POM di Gorontalo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
10	<i>Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan</i>	<i>Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP</i>
		<i>Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal</i>
11	<i>Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel</i>	<i>Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo</i>
		<i>Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo</i>

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM di Gorontalo dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM di Gorontalo untuk tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Rincian sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM di Gorontalo digambarkan dalam tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM di Gorontalo) dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja (Kepala BPOM RI).

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	<i>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo</i>	<i>Persentase Obat yang memenuhi syarat</i>	83,60%
		<i>Persentase Makanan yang memenuhi syarat</i>	80,00%
		<i>Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</i>	87,00%

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	73,00%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	84.50%
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	90%
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89.00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	3,76%
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.83%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	12
		Jumlah pasar aman dari Bahan Berbahaya	2
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,50%

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo		
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81,00%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB BPOM di Gorontalo	92%
		Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	84%
9	Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo	77%
10	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	71.00%
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	2%
11	Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	94%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo	(90%) Efisien

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Sebagai tindak lanjut atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang menggambarkan pelaksanaan kinerja per triwulan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel :2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	316.680.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	154.589.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	239.400.000

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82	82	82	82	129.551.000
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	73	124.000.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84,5	4.362.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	76	150.000.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo	-	-	-	90	150.000.000
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	272.502.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	272.502.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	51.800.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	88.475.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	272.502.000
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo	-	-	-	3,76	150.000.000
5	Meningkatnya efektifitas	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,83	94,83	94,83	94,83	150.000.000

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	35%	40	711.488.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	35%	80%	12	903.603.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	20%	60%	80%	2	101.119.000
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5	95,5	95,5	95,5	765.353.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5	95,5	95,5	95,5	765.353.000
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	40	60	81	684.883.000
8	Terwujudnya tata kelolapemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	Indeks RB Balai POM di Gorontalo	-	-	-	92	409.573.000
		Nilai AKIP Balai POM di Gorontalo	-	-	-	84	621.530.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Gorontalo	-	-	-	77	409.573.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	71	6.493.890.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal	-	2	2	2	84.550.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo	25	50	70	94	2.439.309.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	Efisien (90%)	5.620.000.00

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi BPOM di Gorontalo. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang adalah dilakukan sebagai berikut :

1. BPOM di Gorontalo melakukan pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e – performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e- SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level indllidu secara periodic triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya;
2. BPOM di Gorontalo menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja yang dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM;
3. Mengunggah / mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi e-performance, monev SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas, serta bit.ly/capaianUPTtahun2021;
4. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Triwulan ke I Tahun 2021

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan BPOM di Gorontalo dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja BPOM di Gorontalo dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan 1 terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2021, capaian kinerja sampai dengan triwulan 1 tahun 2021, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 6 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam gambar

Gambar 3.1 : Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Pada triwulan II tahun 2021 BPOM di Gorontalo telah melaksanakan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 11 sasaran kegiatan seperti pada tabel dibawah ini. Perhitungan Capaian sasaran kegiatan Triwulan 1 Tahun 2021 tersebut adalah dihitung perbandingan antara realisasi triwulan 1 yang ditetapkan. Capaian sasaran kegiatan triwulan 1 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan BPOM di Gorontalo sd Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian Tw 1	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	97,11	Baik
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo	113,86	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	96,45	Baik
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	104,50	Baik
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	107,68	Baik
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	102,75	Baik
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo	72,03	Cukup
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal	95,67	Baik

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

9	Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja optimal	111,04	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	107,72	Baik
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Gorontalo secara Akuntabel	99,33	Baik

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Kinerja BPOM di Gorontalo tahun 2021 telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dalam mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja .

Tabel 3.2 Target dan Capaian Indikator Kinerja BPOM di Gorontalo Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian Indikator TW 2	Kriteria Indikator TW 2
			83,6			

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW 2	Realisasi TW 2	Capaian Indikator TW 2	Kriteria Indikator TW 2

Dari 28 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 9 indikator kinerja capaiannya “sangat baik”, 5 indikator kinerja dengan kategori “baik”, 4 indikator kinerja dengan kategori “cukup” .

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Gorontalo yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 4 indikator

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

kinerja yaitu persentase obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan yang memenuhi syarat

A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	83,60%	90,70%	108,49%	Baik

Obat yang tidak memenuhi syarat ditetapkan berdasarkan kriteria meliputi obat yang tidak memiliki nomor izin edar, obat kadaluarsa/rusak, obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase obat yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persentase obat yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, jumlah sampel yang disampling sebanyak 453 sampel dimana diantaranya terdapat 68 sampel TMS meliputi 2 sampel tanpa izin edar, 4 sampel MK penandaan tetapi TMS uji laboratorium dan 62 sampel TMK penandaan tetapi MS uji laboratorium. Nilai persentase obat yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan III Tahun 2021 adalah 84,99% dengan capaian kinerja 105,19% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria "Baik". Nilai tersebut mengindikasikan masih terdapat banyak sampel TMS yang disebabkan karena TMK penandaan.

A.1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Tabel 3.4 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80,00%	71,43%	89,29%	Baik

Perhitungan persentase makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria bahwa makanan yang tidak memenuhi syarat meliputi makanan yang tidak memiliki nomor izin edar, makanan kadaluarsa/rusak, makanan yang tidak

memenuhi ketentuan penandaan dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil pengujian. Nilai persentase makanan yang memenuhi syarat sama dengan 100% dikurangi persen makanan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriteria tersebut. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, jumlah sampel yang disampling sebanyak 195 sampel, dimana 23 sampel diantaranya TMS. Sampel TMS tersebut terdiri dari : 1 sampel tanpa izin edar, 5 sampel MK penandaan tetapi TMS pengujian laboratorium, 15 sampel TMK penandaan tetapi MS pengujian dan 2 sampel TMK penandaan dan TMS pengujian laboratorium. Nilai persentase Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan III tahun 2021 adalah 88,21% dengan capaian kinerja 113,09% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Sangat Baik”.

A.1.3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Tabel 3.5 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	87,00%	94,12%	108,18%	Baik

Perhitungan persentase obat yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 jumlah sampel obat targeted yang telah disampling adalah 124 sampel. Jumlah sampel yang disampling sebanyak 124 sampel, dimana 24 sampel diantaranya TMS. Sampel TMS tersebut terdiri dari : 2 sampel MK penandaan tetapi TMS pengujian laboratorium, 20 sampel TMK penandaan tetapi MS pengujian dan 2 sampel TMK penandaan dan TMS pengujian laboratorium. Nilai persentase obat yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah 80,65% dengan capaian kinerja 94,88% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Baik”.

A.1.4. Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Tabel 3.6 Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan	82%	0	0	cukup

Perhitungan persentase makanan yang aman dan bermutu dihitung berdasarkan jumlah sampel obat targeted yang memenuhi syarat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 jumlah sampel makanan targeted yang telah disampling adalah 93 sampel. Jumlah sampel yang disampling sebanyak 124 sampel, dimana 37 sampel diantaranya TMS. Sampel TMS tersebut terdiri dari : 1 sampel MK penandaan tetapi TMS pengujian laboratorium, 18 sampel TMK penandaan tetapi MS pengujian dan 2 sampel TMK penandaan dan TMS pengujian laboratorium serta 16 sampel TMS uji khusus pangan tertentu. Nilai persentase makanan yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah 60,22% dengan capaian kinerja 75,28% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Cukup”. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak sampel TMK label namun MS pengujian.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.2. Meningkatnya Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo , dihitung berdasarkan capaian nilai 1 indikator yaitu Indeks kesadaran

masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Gorontalo.

A.2.1 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah mengukur sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap Cek KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *cross sectional* (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di *smartphone enumerator*.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan dengan target sebesar 70. Adapun capaian terhadap Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan bahwa target Balai POM di Gorontalo sebesar

70 dan realisasi di Triwulan II tahun 2021 sebesar 79,70% atau persentase capaian 113,86 % dengan kriteria Sangat Baik.

Tabel 3.7 Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	70	79,70%	113,86	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

A.3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengeasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian nilai indikator Indeks yang dilaksanakan diakhir tahun 2021 dengan Hasil sebagai berikut :

A.3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat

dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan target sebesar 83 dan realisasi di Triwulan II tahun 2021 sebesar 84,53% atau persentase capaian 101,84 % dengan kriteria Baik.

Tabel 3.8 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan</i>	83	84,53%	101,84%	Baik

A.3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan target sebesar 74 dan realisasi di Triwulan II tahun 2021 sebesar 62,70% atau persentase capaian 84,73 % dengan kriteria Cukup.

Tabel 3.9 Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan</i>	74	62,70%	84,73%	Cukup

A.3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan melalui survey yang dilaksanakan oleh Badan POM dengan target sebesar 89 dan realisasi di Triwulan I tahun 2021 sebesar 91,47% atau persentase capaian 102,78 % dengan kriteria Baik.

Tabel 3.10 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Gorontalo</i>	89 %	91,47%	102,78%	Baik

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

A.4 Meningkatkan Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah Kerja BPOM Gorontalo

Sasaran kegiatan 4 yaitu Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo, dihitung berdasarkan capaian 6 nilai indicator yaitu :

A.4.1. Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Tabel 3.11 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	87			Sangat Baik



Gambar 3.2 Perbandingan Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terhadap target TW II dan Target tahun 2021

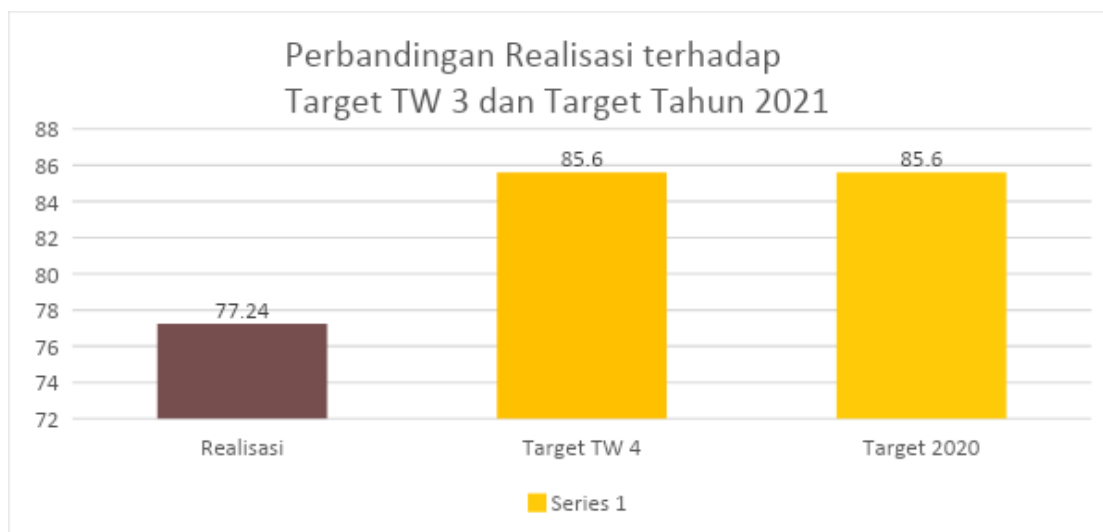
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan parameter yaitu keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BPOM di Gorontalo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BPOM di Gorontalo, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BPOM di Gorontalo, rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh BPOM di Gorontalo yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain, dan rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BPOM di Gorontalo. Realisasi sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 101,28% jika dibanding dengan target yang ditetapkan yakni 87% sehingga maka Capaian kinerja pada Triwulan I yaitu sebesar 116,41% dengan kriteria “Sangat baik”.

Salah satu kunci tercapainya indikator ini adalah komunikasi dan koordinasi yang baik antar Bidang di internal BPOM di Gorontalo, BBPOM dengan Pusat, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antara BPOM di Gorontalo dengan lintas sektor. Komunikasi dan koordinasi tersebut diharapkan lebih ditingkatkan agar capaian indikator ini dapat lebih baik lagi di sisa tahun berjalan.

A.4.2 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku kepentingan

Tabel 3.12 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh pemangku kepentingan	85,6			Baik



Gambar 3.3 Perbandingan Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terhadap target TW 4 dan Target tahun 2021

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan merupakan rekomendasi yang diberikan oleh BPOM di Gorontalo kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dan telah ditindaklanjuti. Realisasi sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 77,24 % jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2021 yaitu 85,6% maka Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 90,23 % dengan kriteria “Baik”.

A.4.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Tabel 3.13 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo	85			Sangat Baik

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

Pada tahun 2021, sampai dengan triwulan 4 terdapat 3 sarana yang mengajukan sertifikasi yakni permintaan untuk PSB dalam rangka pendaftaran pangan olahan dan sertifikasi CDOB. Permintaan PSB telah dilayani dengan baik dan telah diterbitkan rekomendasi sesuai time line. PBF yang mengajukan sertifikasi CDOB juga telah dilakukan pemeriksaan setempat dan sementara dalam proses melengkapi CAPA melalui aplikasi. Begitu juga dengan permintaan pengujian sampel pihak Ke-3, sebagian besar hasil pengujian telah diterbitkan sesuai timeline

Sampai dengan triwulan 1 tahun 2021, realisasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 98,04% dari target sebesar 85%. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 115,34% dengan kriteria “sangat Baik”.



Gambar 3.4 Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Pelaku usaha umumnya memiliki pemilik/penanggung jawab yang belum cukup pengetahuan/pemahaman terkait peraturan/ persyaratan sesuai ketentuan termasuk juga bagaimana pembuatan SOP serta bagaimana tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil temuan (CAPA) sehingga dapat menjadi kendala dalam pemenuhan sertifikasi yang dikeluarkan tepat waktu. Beberapa hambatan dan tantangan Internal dalam pelaksanaan penilaian

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

sertifikasi diantaranya adalah keterbatasan SDM, serta perlunya penguatan SDM dalam hal kompetensi teknis tetapi juga kemampuan berinovasi untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik.

Untuk itu BPOM di Gorontalo telah melakukan beberapa upaya yang menunjang keberhasilan dalam mencapai Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan Tepat Waktu di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo antara lain :

- Menerima konsultasi baik secara langsung dengan datang ke kantor maupun melalui telepon atau whatsapp;
- Pendampingan kepada pelaku usaha baik dalam rangka e-registration pendaftaran pangan olahan maupun kegiatan pendaftaran produk yang lain;
- Pendampingan UMKM

A.4.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.14

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

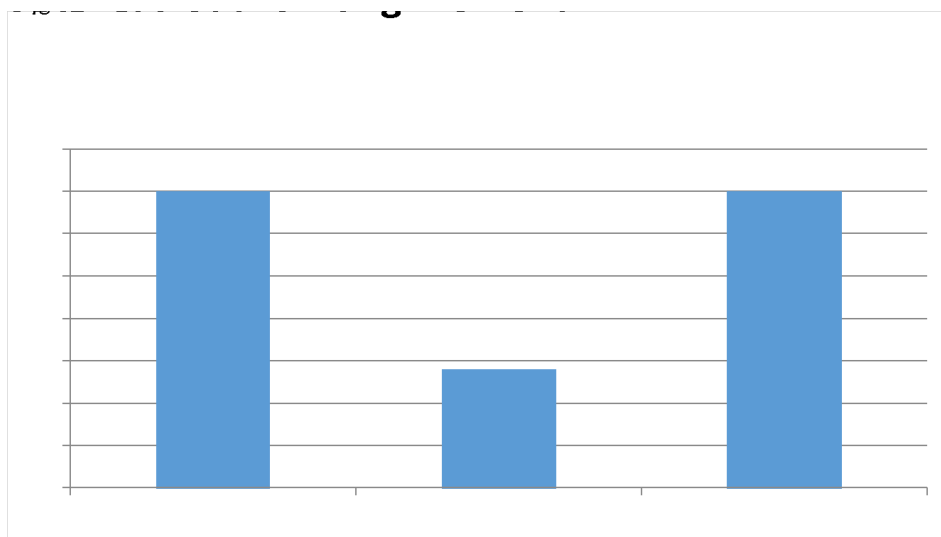
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50			Baik

Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 meliputi Industri Pangan, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri kosmetik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang bisa meningkat menjadi Industri Pangan.

Capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2021 terhadap indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 45,83 % dari

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

target 50%, Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 91,66% dengan kriteria “Baik”.



Gambar 3.5 persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan

A.4.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Tabel 3.15

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

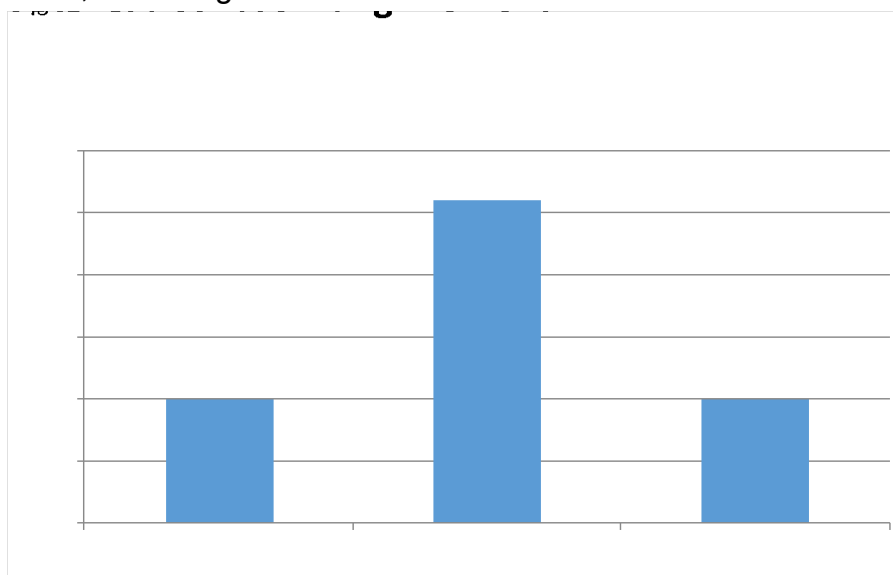
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60			Baik

Pengawasan Sarana Distribusi OMKA meliputi sarana distribusi obat (PBF,IFK) dan sarana pelayanan kefarmasian (RS,Puskesmas, Apotek, Toko Obat, Klinik), sarana distribusi obat tradisional, sarana distribusi suplemen Kesehatan, sarana distribusi kosmetika dan sarana distribusi pangan yang ada di provinsi Gorontalo baik itu sarana yang berskala distributor, Supermarket,

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

mini market, toko maupun warung/kios yang menjual/mendistribusikan produk yang diawasi BPOM.

Capaian sampai dengan Triwulan I tahun 2021 terhadap indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 60,32 % dari target 60%, Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 100,53% dengan kriteria "Baik".



Gambar 3.6 persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan

A.4.6. Indeks Pelayanan Publik di BPOM Gorontalo

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Triwulan I berdasarkan data yang diolah Biro Hukor dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo adalah 3,96. Nilai tersebut melampaui target tahun 2021 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,51. Atas perolehan nilai tersebut, capaian indikator pelayanan publik sebesar 112,82 % dengan kategori sangat baik.

Adapun kategori nilai sebagai berikut :

Rentang Nilai	Kategori	Makna
0 - 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk

2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Sasaran Kegiatan 5

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

A.5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 5 yaitu Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, terdiri dari 4 indikator kegiatan yaitu Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

A.5.1 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Tabel : 3.16 Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Gorontalo</i>	92,97			Baik

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman

masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pelaksanaan pengukuran atas Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif menggunakan *tools* pada *link* yang telah disiapkan oleh Biro HDSP terhadap minimal 30 orang responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai media sampai dengan Triwulan I. Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima, penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE, serta minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektifitas KIE yang dilakukan oleh Biro HDSP, nilai efektifitas KIE BPOM di Gorontalo pada triwulan II sebesar 97,12 dengan target tiap triwulan tetap hingga akhir tahun 2021 yaitu sebesar 92,97 sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 104,46% dengan kategori "Baik". Nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan sangat efektif.

A.5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Tabel : 3.17

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16			Baik

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya

serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Bone Bolango dengan total target sebesar 16 sekolah. Target berubah dari 20 sekolah menjadi 16 sekolah karena adanya pandemi COVID-19 sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2021 sebanyak 17 sekolah sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 106,25% dengan kategori “Baik”. Realisasi melebihi target sebanyak 1 sekolah dikarenakan sekolah di luar target tersebut meminta kepada Balai POM di Gorontalo untuk dilakukan intervensi sekolah dengan PJAS aman. Sekolah tersebut mendapatkan informasi program intervensi BPOM dari koordinator wilayah sekolah dasar.

A.5.3 Jumlah desa pangan aman

Tabel : 3.18 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Jumlah Desa Pangan Aman</i>	5			Sangat Baik

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan total target sebesar 5 desa. Realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2021 melebihi target yaitu 6 desa sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 120% dengan kategori “Sangat Baik”. Realisasi melebihi target sebanyak 1 desa dikarenakan desa tersebut telah mendapatkan pembagian rapid tes kit di awal tahun sebelum adanya perubahan target desa pangan aman akibat pandemi.

A.5.4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Tabel : 3.19 Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya</i>	1			Baik

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan total target sebanyak 1 pasar. Realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2021 melebihi sesuai dengan target yaitu 1 pasar sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori “Baik”

Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.6. Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BPOM di Gorontalo, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar, persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

A.6.1. persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.20 persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	95			Baik

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah sampel obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel yang disampling.

Pengadaan sampel obat yang dilakukan di Balai POM di Gorontalo sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebanyak 577 sampel dengan hasil 95,22 % sampel diperiksa sesuai standar. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian laboratorium

A.6.2. persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Tabel 3.21 persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar	95			Baik

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perbandingan antara jumlah sampel makanan yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar terhadap jumlah sampel makanan yang disampling.

Pengadaan sampel makanan yang dilakukan di Balai POM di Gorontalo sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebanyak 288 sampel dengan hasil 100% sampel diperiksa sesuai standar. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian laboratorium.

Sasaran Kegiatan 7

Tingkat Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

A.7. Tingkat Efektllitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo

Sasaran Kegiatan ke 7 yaitu Tingkat Efektllitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Gorontalo yang merupakan *internal process perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

A.7.1. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tabel 3.22 Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	79%			Cukup

Untuk pengukuran kinerja tahun 2021, Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Sampai dengan Triwulan 4 tahun 2021 terdapat 3 perkara yang ditangani PPNS BPOM Gorontalo dengan posisi perkara 1 SPDP, 1 Perkara tahap 1 dan 1 Perkara Tahap II. Selain kasus pada

tahun ini PPNS BPOM Gorontalo juga masih menangani 2 kasus carry over. Dari 2 Perkara tersebut 1 Perkara telah selesai sampai Tahap 2 dan 1 perkara lainnya sementara dilakukan pemberkasan.

Realisasi keberhasilan penindakan I tahun 2021 sebesar 56,9% dari target sebesar 79%. Sehingga Persentase capaian atas indikator ini adalah 72,03% dengan kriteria “Cukup”. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan kondisi Pandemic Corona menyebabkan adanya keterbatasan dalam melakukan kegiatan di luar kantor. Kegiatan Penindakan pada tahun 2021 dapat berjalan dengan normal pada triwulan I dan beberapa kasus yang Carryover sudah dilakukan Penghentian perkara sesuai dengan ketentuan.

Pandemi COVID juga berpotensi terjadinya kejahatan di bidang obat dan makanan ilegal. Didasari oleh permintaan akan obat dan suplemen kesehatan yang tinggi serta harga yang melambung tinggi akan memicu potensinya penjualan obat tanpa resep, potensi Suplemen Kesehatan Palsu Hingga Penyaluran Makanan yang telah dekat kadaluarsanya. Oleh karena itu pengawasan obat dan makanan tidak boleh diturunkan pengawasannya dan perlu strategi baru dengan tetap mempertimbangkan Social Distancing dan Physical Distancing. Diantaranya dengan melalui pengawasan di media online melalui Cyber Patrol. Kegiatan patroli siber telah dilakukan secara rutin, dan juga dilaporkan ke Direktorat Intelijen Deputi Bidang Penindakan

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

A.8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal

Sasaran Kegiatan ke 8 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Gorontalo yang Optimal, dihitung berdasarkan capaian 2 indikator yaitu Indeks RB BPOM di Gorontalo dan Nilai AKIP BPOM di Gorontalo.

A.8.1. Indeks RB BPOM di Gorontalo

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks RB BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun dengan Realisasi di triwulan II Tahun 2021 adalah 85,62 % dari target 91 % atau capaian kinerja indikator ini sebesar 94,09% dengan kategori “Baik”.

Tabel 3.23 Indeks RB BPOM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks RB BPOM di Gorontalo</i>	91%			Baik

A.8.2. Nilai AKIP BPOM di Gorontalo

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BPOM di Gorontalo adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk BPOM di Gorontalo.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Nilai AKIP BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun dengan Realisasi triwulan I Tahun 2021 adalah 77,8 % dari target 80 % atau capaian kinerja indikator ini sebesar 97,25% dengan kategori “Baik”.

Tabel 3.24 Nilai AKIP BPOM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BPOM di Gorontalo	80%			Baik

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya SDM Balai POM di Gorontalo yang berkinerja Optimal

A.9 Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo.

A.9.1 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi,

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS yang terakhir.
2. Kompetensi mengukur data/informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS dan memiliki kesesuaian dengan tugas jabatan.
3. Kinerja mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja.
4. Disiplin mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman disiplin yang pernah diterima PNS dalam waktu 5 tahun terakhir.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan dengan target sebesar 75 dan untuk hasil di Triwulan I adalah 83,28 % atau persentase Capaian 111,04 dengan Kriteria Sangat Baik

Tabel 3.25 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo</i>	75%			Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 10 Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

A.10 Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ke-10 yaitu Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan *learning & growth perspektif*, dihitung berdasarkan capaian indikator Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Gorontalo yang optimal.

A.10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pertama yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan pengukuran pada Triwulan ke I dan dari Target 70 PERSEN dicapai Realisasi sebesar 72 persen dengan Pesentase Capaian 102,85 dengan kriteria Sangat Baik

Tabel 3.26 Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Gorontalo</i>	70			Baik

A.10.2 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

- Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - 1) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- 2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun indllidu.

Indeks pengelolaan data dan informasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional.

Dari Hasil nilai asesment indeks pengelolaan data dan informasi pada Triwulan ke 1 BPOM di Gorontalo 1,7 nilai tersebut lebih tinggi dari target sebesar 1.51.

Tabel 3.27 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
<i>Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BPOM di Gorontalo yang Optimal</i>	1,51			Sangat Baik

Sasaran Kegiatan 11

Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

A.11. Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel

Sasaran kegiatan-11 yaitu Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara Akuntabel, terdiri dari 2 indikator kegiatan yaitu Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo.

A.11.1. Nilai Kinerja Anggaran

Capaian Nilai: 90,26 (Baik)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

Perhitungan capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/2011 bahwa Evaluasi Kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) implementasi, (2) manfaat, dan (3) evaluasi

implementasi yang diukur menggunakan empat indikator, yaitu (a) penyerapan anggaran, (b) konsistensi perencanaan dan implementasi, (c) pencapaian output, dan (d) efisiensi.

A.11.2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo

Capaian Nilai: 112,36 (Baik)

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input, di TW 4 realisasi persentase tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 89%.

Pengelolaan keuangan secara akuntabel dirasakan masih belum optimal, hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPOM di Gorontalo salah satu dengan melihat kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM di Gorontalo. Kualitas dapat dilihat melalui angka atau *score* capaian indikator. Angka ini dapat berfungsi sebagai peringatan dini atas area-area akuntabilitas pengelolaan keuangan yang memerlukan perbaikan, serta dapat pula digunakan untuk membandingkan capaian antar periode maupun antar unit pelaporan.

Berikut adalah langkah yang telah dilakukan oleh BPOM di Gorontalo dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan secara akuntabel pada Tahun 2021 :

1. BPOM di Gorontalo menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap data informasi kinerja yang dengan SK penunjukan yang ditetapkan oleh BPOM;
2. Mengunggah / mengentry data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada bulan berikutnya melalui aplikasi e-performace, monev SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas, serta bit.ly/capaianUPTtahun2021;

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

- Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka optimalisasi target capaian yang dihasilkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 BPOM di Gorontalo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 13.166.952.000. Dari pagu yang anggaran terealisasi sebesar Rp. 12.506.311.200,- atau terealisasi sebesar 94,98% barikut realisasi anggaran perjenis belanja :

- Belanja pegawai Rp. 5.313.879.949,- atau 91,98%
- Belanja barang Rp. 6.999.028.004,- atau 97,30%
- Belanja modal Rp. 193.403.247,- atau 98,42%

Pelaksanaan anggaran yang telah dijalankan pada periode Triwulan I ini terealisasi pembelanjaan anggaran sebesar 94,98 %, dengan rincian sebagaimana pada :

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran per Output Kegiatan BPOM di Gorontalo Triwulan ITahun 2021

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e
1	3165.003 Sampel Makanan yang Diperiksa (sampel)	184.456.000	173.627.535	94,13
2	3165.004 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa (sarana)	46.340.000	38.979.200	84,12
3	3165.005 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa (sarana)	274.440.000	263.124.742	95,88
4	3165.011 Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan (laporan)	13.020.000	12.441.800	95,56
5	3165.012 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice (laboratorium)	925.258.000	859.819.416	92,93
6	3165.042 Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Gorontalo (Perkara)	239.388.000	221.338.600	92,46

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

7	3165.081 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa (sampel)	306.785.000	305.490.823	99,58
8	3165.085 Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) (sekolah)	496.053.000	490.166.710	98,81
9	3165.087 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (jenis)	37.160.000	33.441.500	89,99
10	3165.088 KIE Obat dan Makanan Aman (KIE)	508.063.000	502.007.364	98,81
11	3165.089 Desa Pangan Aman (desa)	695.546.000	694.441.787	99,84
12	3165.090 Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (pasar)	26.654.000	26.330.500	98,79
13	3165.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	196.500.000	193.403.247	98,42
14	3165.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1.078.927.000	1.041.302.374	96,51
15	3165.994 Layanan Perkantoran (Layanan)	8.138.362.000	7.650.395.602	94,00
		13.166.952.000	12.506.311.200	94,98

BPOM di Gorontalo senantiasa memperbaiki pengelolaan anggaran berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan anggaran yang sehat di lingkungan pemerintahan. Salah satunya adalah perencanaan perbaikan pengelolaan anggaran yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 20 Maret 2021 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2021, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dituntut untuk bersinergi dengan BNPB dalam melaksanakan penanggulangan bencana Covid-19.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh BPOM di Gorontalo antara lain :

1. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sesuai rencana penarikan dana pada triwulan 1

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022

2. Sinkronisasi kegiatan terpadu Pusat dan Balai yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM yang mungkin terdampak dengan kebijakan *refocusing*;
3. *Review* target pelaksanaan kegiatan
4. Pelaksanaan evaluasi anggaran dilaksanakan secara periodik dan berkala dari penanggungjawab kegiatan.

BAB II PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja interim I

tahun 2021 Balai POM di Gorontalo menyajikan hasil pengukuran terhadap 11 (Sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama. Secara garis besar pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Gorontalo dengan rata-rata capaian sebesar 97,11% (Baik) . Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 105,19%,
 - b. Persentase makanan yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 113,09%,
 - c. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 94,88%, dan
 - d. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 75,28%
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo dengan capaian sebesar 113,86% (Sangat Baik) ditunjukkan dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (Awareness Index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu.
3. Meningkatnya Kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo dengan capaian sebesar 96,45% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 101,84%.
 - b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 84,73%.
 - c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Gorontalo sebesar 102,78%
4. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana obat dan makanan pelayanan public di masing-masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo dengan rata-rata capaian sebesar 104,50% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 116,41%.
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 90,23%.
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 115,34%.
 - d. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 91,66%.
 - e. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 100,53%, dan
 - f. Indeks Pelayanan Publik BPOM di Gorontalo sebesar 112%.
5. Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo dengan rata-rata capaian sebesar 107,68% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
- a. Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan sebesar 104,46%.
 - b. Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) sebesar 106,25%.
 - c. Jumlah desa pangan aman sebesar 120%, dan
 - d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya sebesar 100%

6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo dengan rata-rata capaian sebesar 102,75% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100,23%.
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 105,26%
7. Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing- masing wilayah kerja BPOM di Gorontalo dengan capaian sebesar 72,03% (Cukup) ditunjukkan dengan capaian IKU persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BPOM di Gorontalo yang optimal dengan rata- rata capaian sebesar 95,67% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU yaitu:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Gorontalo sebesar 94,09%.
 - b. Nilai Akuntabilitas Internal Pemerintah Balai POM di Gorontalo sebesar 97,25%
9. Terwujudnya SDM BPOM di Gorontalo yang berkinerja optimal dengan capaian sebesar 111,04% (Sangat Baik) ditunjukkan dengan capaian IKU Indeks profesionalitas ASN di Balai POM di Gorontalo.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan rata-rata capaian sebesar 107,72% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP sebesar 102,86%.
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Gorontalo yang optimal sebesar 112,58%.
11. Terkelolanya Keuangan BPOM di Gorontalo secara akuntabel dengan rata-rata capaian sebesar 99,33% (Baik). Hal ini ditunjukkan dengan capaian IKU:

- a. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Gorontalo sebesar 86,30%.
- b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BPOM di Gorontalo sebesar 112,36%.

4.2 . SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2021 Triwulan II, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terkait perencanaan kegiatan, anggaran, keuangan, kepegawaian, kearsipan, sistem mutu, serta melakukan monitoring terkait permasalahan yang terjadi.
2. Target untuk beberapa capaian indikator yang nilai capaiannya “Cukup” untuk dilakukan peningkatan/dikaji secara mendalam kedepannya.
3. Mengikuti perkembangan dan pemngembangan kompetensi secara rutin melalui webinar dan di sesuaikan dengan kebutuhan serta perencanaan pengembangan kompetensi di Balai POM Gorontalo.
4. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.